



RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



<https://satpolpp.sultengprov.go.id/>



@satpolpp_provsulteng

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029 dapat diselesaikan.

Sebagai irisan dan penerjemahan RPJMD, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah menyusun Rencana Startegis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 hingga 5 Tahun, sehubungan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan dan isu strategis dan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah.

Kami sangat menyadari bahwa penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029 ini masih sagat jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu, Satuan Polisi Pamong Praja mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi menyempurnakan penyusunan Rencana Strategis ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah kedepan.

Terima Kasih.

Palu, 2025
Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Sulawesi Tengah

Drs. Farida Karim, M.Si
Pembina Tkt. I (IV/b)
NIP. 196819681204 198811 2 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.	10
1.4 Sistematika Penulisan.	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATPOL PP PROV SULTENG.....	13
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.	13
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	16
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	23
2.5 Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis.....	24
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	27
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP	27
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan	30
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN TRANTIBUMLINMAS.....	33
BAB V PENUTUP	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, maka penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja adalah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi daerah sesuai dinamika pembangunan. Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tersebut juga merupakan pengimplementasian Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Tengah yang juga mengacu kepada Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) serta turut memperhatikan RPJM Nasional.

Rencana strategi (Renstra) Perangkat Daerah adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui *feedback* yang sistematis.

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Perangkat Daerah berkewajiban menyiapkan Renstra yang secara teknis merupakan

penjabaran dari RPJMD Pemerintah Daerah. Renstra sendiri berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Perencanaan merupakan suatu siklus dalam proses menentukan kebijakan melalui urutan pilihan yang tepat dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai lembaga memerlukan rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh yang dapat memberikan rumusan arah pengembangan organisasi ke masa depan, untuk mencapai sasaran-sasaran jangka panjang dan jangka pendek ke mana suatu organisasi akan diarahkan, rencana tersebut disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan bersifat indikatif yang dirumuskan secara transparan, responsif, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada PD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah. Kualitas dokumen Renstra sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renstra PD sangat

ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi.

Sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 255 dimana dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagai diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 178 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
29. Peraturan Meneteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 (Lembar darah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 168);
34. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi.

1.3 Maksud dan Tujuan.

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah 2025 – 2029 adalah Menyediakan informasi yang valid mengenai rencana jangka menengah tahun 2025 – 2029 sebagai dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, RKA-OPD dan penetapan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 – 2029 sebagai wujud Transparansi dan Akuntabilitas Publik serta terkait dengan urusan ketenteraman ketertiban umum sebagai arah pedoman kebijakan pembangunan yang semestinya dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Sulawesi Selatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang ketenteraman dan ketertiban umum

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 – 2029, adalah:

1. Sebagai pedoman perencanaan dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja untuk periode 5 (lima) tahun;
2. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan Keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 - 2029 dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 – 2029 untuk menciptakan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah.

3. Pedoman dalam mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 12 ayat 1 huruf e, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
4. Menetapkan acuan dalam melaksanakan perencanaan, monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah
5. Memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja hingga 5 (lima) tahun mendatang.

1.4 Sistematika Penulisan.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud tujuan dan sistematika penulisan penyusunan Rancangan Awal Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029.

BAB II : GAMBARAN UMUM PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bab ini memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah; Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah; Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029; mengidentifikasi permasalahan dan isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah.

- BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
- BAB V : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Gambaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan penanganan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan peraturan daerah / peraturan kepala daerah, serta penanganan pencegahan dan pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada Pasal 255 dimana pada ayat (1) dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Untuk mewujudkan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya Pasal 255, maka Pemerintah Pusat telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi sebagaimana peraturan tersebut diatas dapat kami uraikan tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai berikut :

2.1.1. Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja

Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

- a. Menegakkan Perda dan Perkada;
- b. Menyenggarakan ketertiban umum dan ketentraman;
- c. Menyenggarakan perlindungan masyarakat;

- d. Pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

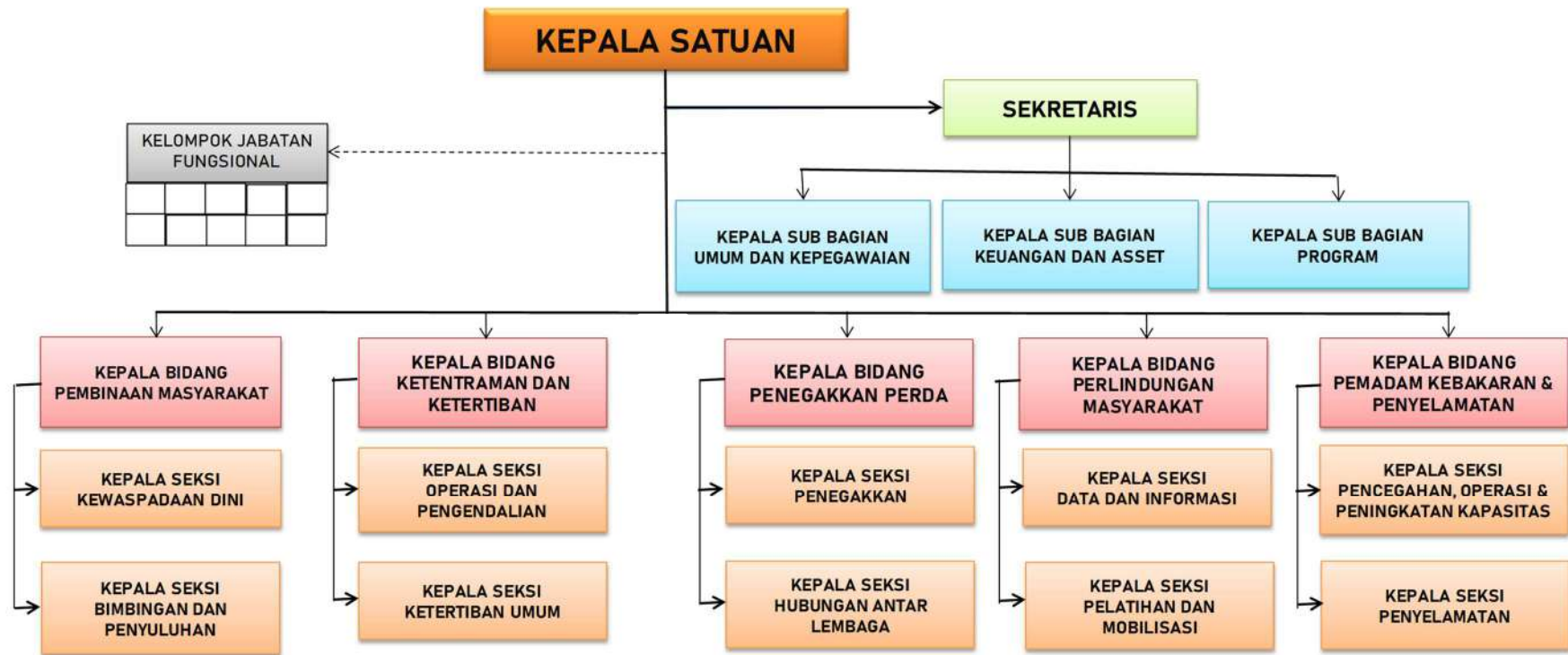
2.1.2. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat, pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan serta penyelamatan non kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat, pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat, pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada;
- e. menyusun pemetaan rawan kebakaran;
- f. menyusun manajemen layanan kebakaran; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Sulawesi Tengah dapat uraikan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretaris membawahi :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset, dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- c. Bidang Pembinaan Masyarakat membawahi:
 - 1. Seksi Kewaspadaan Dini; dan
 - 2. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman membawahi :
 - 1. Operasi dan Pengendalian, dan
 - 2. Seksi Ketertiban Umum;
- e. Bidang Penegakan Perda membawahi :
 - 1. Seksi Penegakan; dan
 - 2. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi:
 - 1. Seksi Data dan Informasi; dan
 - 2. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi;
- g. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan membawahi:
 - 1. Seksi Pencegahan, Operasi dan Peningkatan Kapasitas SDM; dan
 - 2. Seksi Penyelamatan;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.

Sumber daya yang tersedia pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah dapat kami sampaikan sebagaimana yang kami uraian berikut ini :

2.2.1. Kondisi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah bulan Agustus 2025.

Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi. Jalannya roda suatu organisasi sangat tergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki sumber daya manusia sampai dengan Bulan Agustus 2025 sebanyak 193 orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 104 orang dan Pegawai Kontrak sebanyak 89 orang dengan keadaan pegawai seperti tergambar dalam Tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan / eselon di lingkungan Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah
(Per Agustus 2025)

No.	Eselon	Jumlah
1	II	0 orang
2	III	6 orang
3	IV	12 orang
4	Jabatan Fungsional	51 orang
5	Jabatan Pelaksana	26 orang
6	PPPK	83 orang
7	Honor	110 Orang
	Jumlah	204 orang

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Ruang di lingkungan Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah
(Per Agustus 2025)

No.	Gol. / Ruang	Jumlah
1	IV / d	-
2	IV / b	5 orang
3	IV / a	8 orang
4	III / d	9 orang
5	III / c	11 orang
6	III / b	13 orang
7	III / a	18 orang
8	IX	31 orang
9	II / d	21 orang
10	II / c	4 orang
11	II / b	2 orang
12	II / a	2 orang
13	V	52 orang
14	I / d	2 orang
15	I / c	-
16	I / b	-
17	Honor	39 orang
	Jumlah	217 orang

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan di lingkungan
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah
(Per Agustus 2025)

No.	Pendidikan	Jumlah
1	S3	1 Orang
2	S2	17 orang
3	S1	60 orang
4	SLTA	98 orang
5	SMP	1 orang
6	SD	1 Orang
	Jumlah	178 orang

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin di lingkungan
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah
(Per Agustus 2025)

No.	Jenis Kelamin	jumlah
1	Pria	136 orang
2.	Wanita	42 orang
	Jumlah	178 orang

2.2.2. Sarana Prasarana Kunci Pendukung

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah ditunjang oleh pemenuhan Sarana dan Prasarana, yang sampai dengan tahun 2021 kondisinya seperti tertera pada tabel 2.5 di bawah ini.

Tabel 2.5
Sarana dan prasarana penunjang Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 Bidang / 1620M ²
2.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 Unit/905M ² (sudah termasuk Pos Jaga)
3.	Sepeda Motor	27 Unit
4.	Mini Bus	8 Unit
5.	Pick Up	2 Unit
6.	Truk Angkutan Personil	1 Unit
7.	Mobil Pemadam Kebakaran	1 Unit
8.	Mobil Patroli	1 Unit
9.	P.C Unit	35 Unit
10.	Printer	30 Unit
11.	Lap Top	18 Unit
12.	Scanner	3 Unit
13.	LCD Proyektor	3 Unit
14.	Camera Digital	2 Unit
15.	Handy Talky (HT)	60 Unit
16.	Pakaian PHH (lengkap dengan Tameng dan Tongkat T)	45 Unit/Set
17.	Instalasi listrik	1 instalasi
18.	Jaringan internet	3 jaringan

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum, salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan yang menjadi hak setiap warga negara ataupun memberikan pelayanan kepada warganegara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Kewajiban pemerintah, maupun hak setiap warga negara pada umumnya disebutkan dalam konstitusi suatu Negara, termasuk ketentraman dan ketertiban umum, perindungan masyarakat, penegakkan perda dan perkada,

serta layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan non kebakaran di Sulawesi Tengah di dalamnya.

Berdasarkan jenis dan pola pelayanan yang telah disebutkan diatas, maka pada dasarnya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan jenis pelayanan dengan pola pelayanan teknis fungsional dan pola pelayanan elektronik. Satu hal penting yang perlu digaris bawahi adalah Satuan Polisi Pamong Praja memberikan pelayanan tidak hanya kepada publik saja (masyarakat) tetapi juga melaksanakan pelayanan kepada unsur-unsur pemerintahan lainnya, yaitu unsur Pimpinan Daerah, PD/Biro Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah serta kepada Instansi Vertikal yang terkait dengan perencanaan pembangunan, khususnya Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Administrasi Kewilayahan.

2.3.1. Pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Kinerja pelayanan perangkat daerah provinsi Sulawesi Tengah dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD). Ketercapaian tujuan dan sasaran dimaksud dapat terlihat dari indikator kinerja Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 – 2021, terdapat 4 sasaran strategis badan yang diukur melalui 13 (Tiga Belas) indikator sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis tersebut, diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut (tabel.2.6) dibawah ini :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Sulawesi

NO	Indikator Kinerja Utama	2021		2022		2023		2024		Capaian
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	61.50		64.50	93.35	66.50	76.50			115%
2	Persentase penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan(K3)	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%
3	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	11.53%	15%	4.35%	26.50%	4.35%	15%			375%
4	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%
5	Persentase Pendampingan pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%
6	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum							30	50.57	168,57%

Pada Tahun 2024 Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah terjadi perubahan menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-696 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketentraman Ketertuban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dimana Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan melakukan pemutakhiran data Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi, Kab/Kota.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Program-program yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah merupakan program yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana program beserta indikator program untuk masing-masing program ini sedekat mungkin didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah. Indikator program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk penerima manfaat atau kelompok sasaran (beneficiaries) tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan – kegiatan yang dipilih untuk setiap program, merupakan kegiatan yang menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah. Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan diharapkan dapat menjawab berbagai isu strategis dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya pada lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah.

Kelompok sasaran atau penerima manfaat atas program-program yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah secara langsung adalah Perangkat Daerah pada lingkup Pemerintah

Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan secara tidak langsung, manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

2.5 Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis

2.5.1 Permasalahan :

1. Kurangnya jumlah personil
 - a. Jumlah Personil SatPolPP yang bertugas dilapangan yang berstatus PNS masih sangat Minim yaitu 30 orang
 - b. Tenaga Kontrak (PHL) yang bertugas dilapangan 74 orang
 - c. Jumlah PPNS yang ada di Satpolpp 4 orang
2. Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM)
 - a. Pelaksanaan tugas Satpolpp juga sangat dipengaruhi oleh kualitas personil dimana aparat Satpolpp Provinsi Sulawesi Tengah saat ini masih banyak berpendidikan SMA/SLTA dan bahkan ada yang memiliki tingkat pendidikan SMP dan SD;
 - b. Sebagian personil Satpolpp belum mengikuti pelatihan dasar dan pelatihan teknis penunjang yang berhubungan dengan tugas pokok yang diembannya;
 - c. Operasional masih terfokus pada pengamanan kegiatan, pengamanan aset dan rumah jabatan pejabat daerah;
 - d. PPNS dan Satlinmas Provinsi Sulawesi Tengah belum berfungsi sebagaimana mestinya.
3. Sarana dan Prasarana yang tersedia banyak yang mengalami rusak akibat umur dengan beban kerjanya
4. Kegiatan hanya berfokus pada Perda Trantibum yang ditegakan

2.5.2 Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Disamping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang. Penentuan Isu - Isu Strategis Berdasarkan hasil review dari permasalahan pelayanan perangkat daerah, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut:

1. kualitas dan kuantitas SDM,
2. ketersediaan sarana dan prasarana,
3. peningkatan partisipasi masyarakat,
4. efektivitas dan efisiensi penegakan peraturan daerah,
5. serta kebutuhan penguatan koordinasi dan komunikasi dengan instansi lain dan masyarakat untuk menjaga ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Tabel 2.7 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

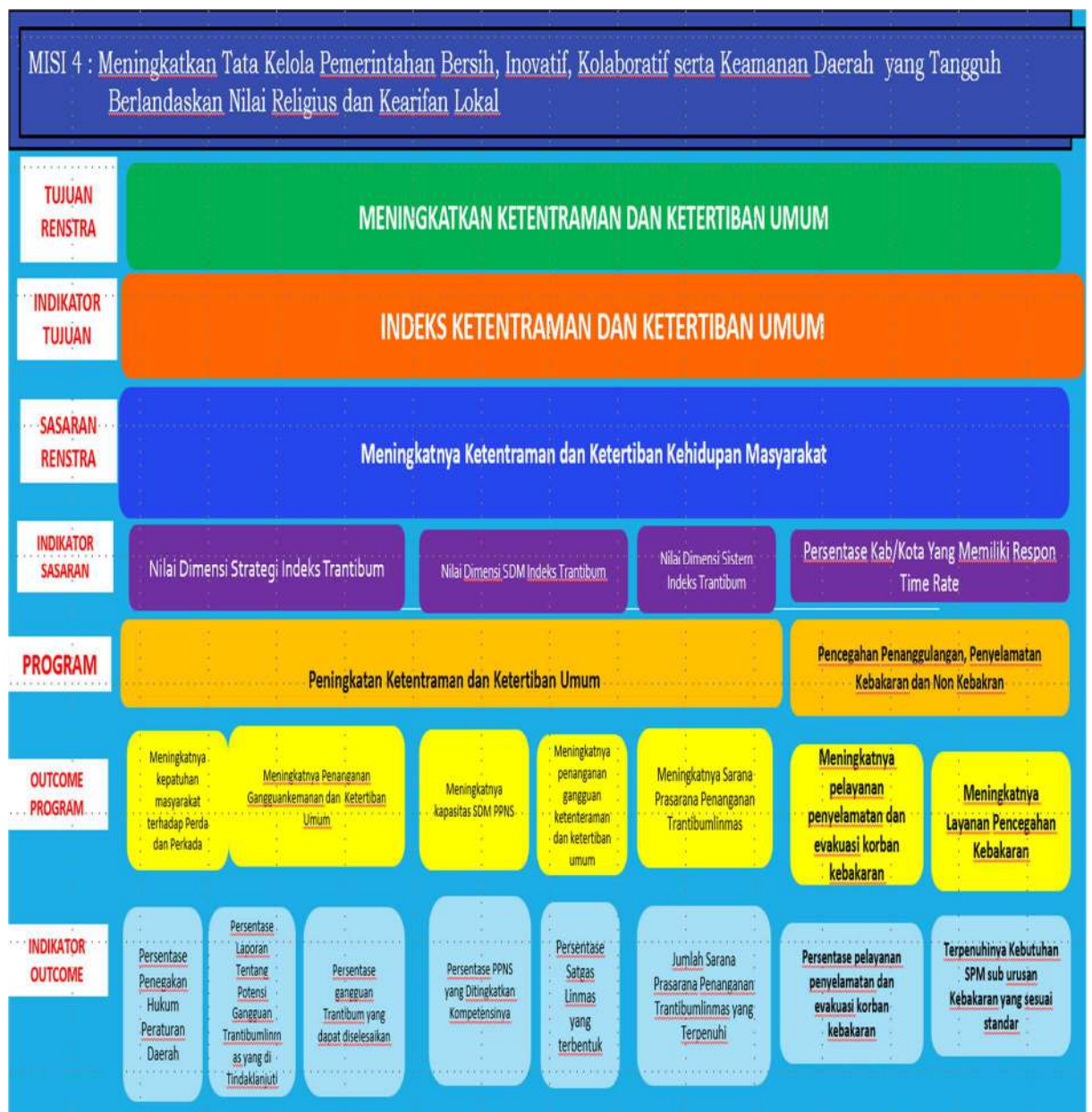
Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis		
			Global	Nasional	Regional
Inovasi pemerintahan dan pelayanan publik yang baik	Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	• Peningkatan urbanisasi dunia • Tata Kelola Keuangan Global • Pertumbuhan Kelas Menengah Model Kelas	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), Penyandang Disabilitas)	Masih rendah akses dan mutu bidang pendidikan dan kesehatan karena sarana dan prasarana yang belum memadai

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP

Sebagai upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta untuk memudahkan penentuan strategi dan arah kebijakan maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang mengacu kepada Misi Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur atau salah satu Sasaran Daerah RPJMD Tahun 2025 – 2029 pada **Misi Ke 4 yaitu “Meningkatkan tata kelola pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif serta keamanan daerah yang tangguh berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal.”**. Dalam penentuan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja, disusun Cascading (pohon kinerja) yang merupakan sebuah proses penjabaran dari Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Tengah, serta tujuan dan sasaran pembangunan kedalam Tujuan, Sasaran, dan Program Perangkat Daerah dengan menggunakan kerangka logis sehingga menjadi lebih rinci dan terbagi habis. Dengan kata lain adanya Cascading tersebut, tumpang tindih tugas dan kewenangan pada setiap jenjang jabatan dapat dihindari. Adapun Cascading Pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja disajikan pada gambar dibawah ini:



Gambar 3.1

Cascading (Pohon Kinerja) Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun perumusan tujuan dalam Rencana Strategis Satpol PP Tahun 2025 – 2029 adalah “Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum”. Selanjutnya terkait dengan tujuan tersebut maka sasaran yang akan diwujudkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah “Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Masyarakat”

Selanjutnya indikator dan target kinerja Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021–2026 untuk setiap sasaran yang ingin dicapai dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah											
- MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat		Indeks Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Indeks)	50,57	50,99	51,25	51,95	52,26	52,98	53,26	
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Masyarakat	Nilai Dimensi Strategi Indeks Trantibum (Nilai)	10,1	10,12	10,34	10,46	10,66	10,86	10,9	
			Nilai Dimensi SDM Indeks Trantibum (Nilai)	24,6	24,74	24,74	24,99	24,99	25,22	25,6	
			Nilai Dimensi Sistem Indeks Trantibum (Nilai)	15,87	16,14	16,42	16,55	16,85	16,92	17	
			Persentase Kab/Kota Yang Memiliki Respon Time Rate (%)	7,69	15,38	23,07	30,76	38,46	46,15	53,84	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Penahapan prioritas pembangunan daerah melibatkan berbagai tahapan yang sistematis untuk menentukan program dan kegiatan yang paling penting bagi pencapaian target pembangunan daerah. Tahapan ini meliputi identifikasi masalah dan potensi daerah, rumusan tujuan dan sasaran pembangunan, serta seleksi program prioritas yang relevan. Prioritas pembangunan daerah bertujuan untuk mendukung capaian sasaran pembangunan daerah, serta meningkatkan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Adapun tahapan prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Penahapan Renstra
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Evaluasi Hasil Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk peningkatan pelayanan publik	Peningkatan SDM Satpol PP dan Sarana Prasarana Pendukung	Penerapan Teknologi daalam Mewujudkan Trantibumlinmas	Pengembangan sistem perlindungan komunitas dan lingkungan pemukiman	Penyusunan <i>Policy Brief</i> untuk RPJMD dan Renstra periode selanjutnya

Pada bab ini juga merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah sebagai upaya yang di tempuh untuk mencapai Tujuan dan Sasaran. Perumusan strategi dan arah kebijakan ini menunjukkan relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi dan misi RPJMD periode 2025–2029 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan strategi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman
- b. Pelaksanaan Perlindungan Masyarakat
- c. Penegakan Peraturan
- d. Meningkatkan Pelayanan Pencegahan Kebakaran

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berfungsi sebagai lembaga perangkat pemerintah daerah yang bertugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban dan ketertiban umum, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta pelayanan Pencegahan Kebakaran. Selain fungsi utamanya sebagai pelaksana fungsi Penyelenggaraan Trantibumlinmas SATPOL PP Provinsi Sulawesi Tengah juga dapat memiliki fungsi lain yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini dapat mencakup penyusunan peraturan perundang-undangan di Trantibumlinmas , berperan dalam koordinasi dengan instansi terkait, melakukan tindakan penertiban non-yustisial, dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

- a. Menjamin kondisi wilayah yang kondusif, aman, dan tertib.
- b. Memberikan perlindungan yang efektif bagi masyarakat dari berbagai potensi gangguan dan bencana
- c. Meningkatkan kepatuhan masyarakat dan badan hukum terhadap Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
- d. Menurunkan risiko dan jumlah kejadian kebakaran di wilayah provinsi.

Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah memperhatikan tugas dan fungsi dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KE T.
	Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Penguatan sistem deteksi dini, pencegahan konflik, dan penanganan gangguan ketertiban masyarakat.	Menjamin kondisi wilayah yang kondusif, aman, dan tertib.	
		Peningkatan kolaborasi aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan pencegahan konflik sosial.	Memberikan perlindungan yang efektif bagi masyarakat dari berbagai potensi gangguan dan bencana	
			Meningkatkan kepatuhan masyarakat dan badan hukum terhadap Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).	
			Menurunkan risiko dan jumlah kejadian kebakaran di wilayah provinsi	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN TRANTIBUMLINMAS

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program, kegiatan dan pendanaan indikatif yang mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, output, outcome maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah selama 5 tahun kedepan dalam kurun waktu 2025 - 2029. disusun menurut urusan pemerintahan daerah dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Kebijakan ini menjadi salah satu dasar dalam merumuskan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra SATPOL PP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada table 4.1 berikut :

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra SATPOL PP

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah							
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Masyarakat			Indeks Ketentraman Dan Ketertiban Umum		
					Nilai Dimensi SDM Indeks Tranitbum		
					Nilai Dimensi Strategi Indeks Tranitbum		
					Nilai Dimensi Sistem Indeks Tranitbum		
					Persentase Kab/Kota Yang Memiliki Respon Time Rate		
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Satpol PP Provinsi		Jumlah Data Statistik Sekdoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sekdoral Daerah	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.05.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.05.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1.05.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1.05.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1.05.01.1.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Satpol PP Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.05.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.05.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.05.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Barang Milik Daerah pada Satpol PP Provinsi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.05.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.05.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.05.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.05.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.05.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.05.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya Profesionalisme ASN Satpol PP	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakai Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1.05.01.1.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1.05.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	1.05.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.05.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Meningkatnya Kematanganan SPBE Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.05.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.05.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.05.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.05.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Satpol PP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1.05.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1.05.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1.05.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.05.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1.05.01.1.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.05.01.1.06 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.05.01.1.06 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.05.01.1.06 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.05.01.1.06 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.05.01.1.06.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.05.01.1.06.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.05.01.1.06.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.05.01.1.06.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Pertizinannya	1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1.05.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Pertizinannya	1.05.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1.05.01.1.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.05.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada		Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Meningkatnya Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum di Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	1.05.02.1.01.0015 - Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah perbatasan daerah	1.05.02.1.01.0023 - Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi	
				Meningkatnya Pencegahan Pelanggaran Perda dan Pergub	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	
					Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	
					Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran		Terpenuhinya Kebutuhan SPM sub urusan Kebakaran yang sesuai standar*	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
				Meningkatnya Kualitas Penyediaan Informasi Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Kab/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan Legal	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) yang Bisa Diperbaharui Atau Dimutakhirkan secara Berkala, Berkelanjutan dan Real Time yang terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Kabupaten/Kota dan dapat Menjangkau Masyarakat	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan Legal	1.05.04.1.01.0006 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
					Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	1.05.04.1.01.0009 - Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran	1.05.04.1.01.0014 - Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1.05.04.1.01.0023 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.05.04.1.01.0024 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
					Jumlah Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) yang Bisa Diperbaharui Atau Dimutakhirkan secara Berkala, Berkelanjutan dan Real Time yang terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Kabupaten/Kota dan dapat Menjangkau Masyarakat	1.05.04.1.01.0036 - Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	
				Meningkatnya Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.05.04.1.02 - Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
					Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	1.05.04.1.02 - Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	1.05.04.1.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.05.04.1.02.0004 - Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
					Persentase Laporan Tentang Potensi Gangguan Trantibumlinmas yang di Tindaklanjuti	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen SK Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Untuk Rasa dan Kenyamanan Massa yang Dilakukan Perindakan	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Diungkap Melalui Seleksi Diri dan Cegah Diri, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1.05.02.1.01.0006 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen SK Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	1.05.02.1.01.0011 - Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1.05.02.1.01.0014 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Perindakan	1.05.02.1.01.0020 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	1.05.02.1.01.0021 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
					Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	1.05.02.1.01.0024 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	
			Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Pengelolaan Informasi Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1.05.04.1.01.0004 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
				Meningkatnya Pembinaan Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Kab/Kota	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1.05.04.1.01.0019 - Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1.05.04.1.01.0022 - Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat		Persentase Satgas Linmas yang terbentuk	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				meningkatnya perlindungan Masyarakat di Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas di tingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah SDM Satuan Pelindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas di tingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	1.05.02.1.01.0012 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi	
					Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	1.05.02.1.01.0022 - Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tingkat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1.05.02.1.01.0030 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	
			Meningkatnya kapasitas SDM PPNS		Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase PNS yang Ditingkatkan Kapasitasnya Menjadi PPNS	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	1.05.02.1.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	1.05.02.1.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	
					Jumlah Laporan Hasil Kerja Sekretariat PPNS	1.05.02.1.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1.05.02.1.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	
					Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	1.05.02.1.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	
					Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	1.05.02.1.03.0003 - Pembentukan Sekretariat PPNS	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	1.05.02.1.03.0004 - Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	1.05.02.1.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1.05.02.1.03.0007 - Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	
					Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	1.05.02.1.03.0008 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	
			Meningkatnya Sarana Prasarana dalam Penanganan TrantibumInmas		Persentase Sarana Prasarana dalam Penanganan TrantibumInmas yang terpenuhi	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Meningkatnya Pencegahan Gangguan Ketertiraman dan Ketertiban Umum di Sulawesi Tengah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketertiraman dan Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat	1.05.02.1.01.0029 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertiraman Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	

Adapun indikator Program, target dan pagu anggaran Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PENSIHATAN MASYARAKAT				19.399.042.565,88		20.605.283.191,5		22.166.589.763,12		23.657.715.135,79		25.754.931.593,92		
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				17.399.042.565,88		17.709.107.688		18.713.722.975		19.457.715.135,79		20.254.931.593,92		
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	55,42	68,4	17.399.042.565,88	70	17.709.107.688	70,5	18.713.722.975	71	19.457.715.135,79	72	20.254.931.593,92	1.05.0.00.0.00.01.0 000 - Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah	
1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30.000.000		30.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Satpol PP Provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	4	30.000.000	4	30.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000		
	Perencanaan Perangkat Daerah	0	2			2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Wadada Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1			1		1		1		1		
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Limbah Perencanaan Daerah	0	1			1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Rencana PD dan Renja PD	0	5			5		5		5		5		
1.05.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.000.000		10.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	2	10.000.000	2	10.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000		
1.05.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi				5.000.000		5.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	4	5.000.000	4	5.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000		
1.05.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tertakutannya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
1.05.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Wakdatu Pendukung Statistik Sektoral				5.000.000		5.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terselenggaranya Wakdatu Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wakdatu Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
1.05.01.1.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Rencana PD dan Rencan PD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terselenggaranya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Rencana PD dan Rencan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Rencana PD dan Rencan PD	0	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000		
1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.299.042.566		13.909.107.689		14.613.722.978		15.137.004.967		15.653.203.092		
Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Satpol PP Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD (Dokumen)	1	1	13.299.042.566	1	13.909.107.689	1	14.613.722.978	1	15.137.004.967	1	15.653.203.092		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1		1		1		1		1			
	Gaji dan Tunjangan ASN	93	121		121		121		121		121			
1.05.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				13.099.042.566		13.709.107.689		14.413.722.978		14.937.004.967		15.453.203.092		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93	121	13.099.042.566	121	13.709.107.689	121	14.413.722.978	121	14.937.004.967	121	15.453.203.092		
1.05.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD				185.000.000		185.000.000		185.000.000		185.000.000		185.000.000		
Tertakutannya Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD (Dokumen)	1	1	185.000.000	1	185.000.000	1	185.000.000	1	185.000.000	1	185.000.000		
1.05.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
1.05.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Barang Milik Daerah pada Satpol PP Provinsi	Jumlah Laporan Rekonstruksi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	0	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	4		4		4		4		4			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milk Daerah SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milk Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milk Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
1.05.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah pada SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tertakutannya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah pada SKPD	0	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000		
1.05.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milk Daerah pada				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tertakutannya Penatausahaan Barang Milk Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milk Daerah pada SKPD (Laporan)	1	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000		
1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				5.000.000		5.000.000		170.000.000		175.000.000		275.000.000		
Meningkatnya Profesionalisme ASN Salipri PP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Jumlah Paket Pelatihan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	5	5.000.000	5	5.000.000	5	170.000.000	5	175.000.000	5	275.000.000		
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	1		1		1		1		1			
1.05.01.1.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1.000.000		1.000.000		15.000.000		20.000.000		20.000.000		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
1.05.01.1.05.0002 - Pengadaan Paket Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				1.000.000		1.000.000		100.000.000		100.000.000		200.000.000		
Tersedianya Paket Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Paket Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000		
1.05.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2.000.000		2.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tertakutannya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
1.05.01.1.05.0004 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				1.000.000		1.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tertakannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikut Pendidikan dan	0	5	1.000.000	5	1.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000		
1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				239.572.500		239.572.500		309.572.500		354.572.500		354.572.500		
Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	239.572.500	1	239.572.500	1	309.572.500	1	354.572.500	1	354.572.500		
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Perabotan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
1.05.01.1.06.0002 - Penyediaan Perabotan dan Perlengkapan Kantor				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Tersedianya Perabotan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perabotan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		
1.05.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				14.572.500		14.572.500		14.572.500		14.572.500		14.572.500		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	14.572.500	1	14.572.500	1	14.572.500	1	14.572.500	1	14.572.500		
1.05.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan				150.000.000		150.000.000		220.000.000		265.000.000		265.000.000		
Tertakannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1	4	150.000.000	4	150.000.000	4	220.000.000	4	265.000.000	4	265.000.000		
1.05.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tertakannya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang				400.000.000,88		100.000.000		150.000.000		320.710.169,79		501.728.502,92		
Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Salpal PP	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	5	400.000.000,88	5	100.000.000	5	150.000.000	5	320.710.169,79	5	501.728.502,92		
	Jumlah Unit Kendaraan Mebel Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				80.000.000		20.000.000		20.000.000		100.000.000		220.345.702,92		
Tersediya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	1	80.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	100.000.000	1	220.345.702,92		
1.05.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				80.000.000		20.000.000		20.000.000		60.710.169,79		70.345.700		
Tersediya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diadatkan (Unit)	0	1	80.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	60.710.169,79	1	70.345.700		
1.05.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				80.000.000		20.000.000		10.000.000		60.000.000		70.345.700		
Tersediya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Diadatkan (Paket)	0	1	80.000.000	1	20.000.000	1	10.000.000	1	60.000.000	1	70.345.700		
1.05.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				80.000.000		20.000.000		50.000.000		50.000.000		70.345.700		
Tersediya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadatkan (Unit)	0	5	80.000.000	5	20.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	70.345.700		
1.05.01.1.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				80.000.000,88		20.000.000		50.000.000		50.000.000		70.345.700		
Tersediya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Diadatkan (Unit)	0	5	80.000.000,88	5	20.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	70.345.700		
1.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Perunggang Urusan				2.540.427.499		2.540.427.499		2.540.427.499		2.540.427.499		2.540.427.499		
Pemerintahan Daerah														
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Sektor PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	4	2.540.427.499	4	2.540.427.499	4	2.540.427.499	4	2.540.427.499	4	2.540.427.499		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	1	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diadatkan (Laporan)	1	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	0	4		4		4		4		4			
1.05.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Tertataannya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000		
1.05.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				205.000.000		205.000.000		205.000.000		205.000.000		205.000.000		
Tersediya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	1	4	205.000.000	4	205.000.000	4	205.000.000	4	205.000.000	4	205.000.000		
1.05.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Tersediya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	0	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000		
1.05.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.595.427.499		2.595.427.499		2.595.427.499		2.595.427.499		2.595.427.499		
Tersediya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diadatkan (Laporan)	1	4	2.595.427.499	4	2.595.427.499	4	2.595.427.499	4	2.595.427.499	4	2.595.427.499		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah				570.000.000		570.000.000		570.000.000		570.000.000		570.000.000		
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	50	570.000.000	50	570.000.000	50	570.000.000	50	570.000.000	50	570.000.000		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	21	23		23		23		23		23			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2		2		2		2		2			
1.05.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)			450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		
		21	23	450.000.000	23	450.000.000	23	450.000.000	23	450.000.000	23	450.000.000		
1.05.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan			50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
		0	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000		
1.05.01.1.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tertaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000		
1.05.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000		
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIDAN UMUM				1.000.000.000		1.550.000.000		1.900.000.000		2.300.000.000		2.850.000.000		
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100	142.735.000	100	245.470.000	100	285.470.000	100	315.470.000	100	415.470.000	1.05.050.000.01.0 000 - Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tenggara	
Terdapat 1.000 - Peningkatan Peningkat Pegawai Negeri Sipil (PPNS)				142.735.000		245.470.000		285.470.000		315.470.000		415.470.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Peningkatan PNS yang Dilengkapi Kapasitasnya Menjadi PPNS	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kerjasama dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)	1	1	142.735.000	1	245.470.000	1	285.470.000	1	315.470.000	1	415.470.000		
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Keterlibatan Umum dan Keterlaksanaan Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan dan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (laporan)	0	4		4		4		4		4			
	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS	0	1		1		1		1		1			
	Penegak Peraturan Daerah Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
1.05.02.1.03.0003 - Pembentukan Sekretariat PPNS				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terbentuknya Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
1.05.02.1.03.0004 - Kerja Sama Antar Lembaga dan Kerjasama dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah				50.000.000		70.000.000		80.000.000		80.000.000		100.000.000		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kerjasama dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kerjasama dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)	1	1	50.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	100.000.000		
1.05.02.1.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS				15.000.000		50.000.000		70.000.000		100.000.000		150.000.000		
Tertaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (laporan)	0	4	15.000.000	4	50.000.000	4	70.000.000	4	100.000.000	4	150.000.000		
1.05.02.1.03.0007 - Peningkatan Kapasitas dan Karir PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan ketribun				40.000.000		60.000.000		70.000.000		70.000.000		100.000.000		
Tersedianya Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Keterlibatan Umum dan Keterlaksanaan Masyarakat serta Penegakan Perda Tersedianya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Keterlibatan Umum dan Keterlaksanaan Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan dan	1	1	40.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	100.000.000		
1.05.02.1.03.0008 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan ketribun				27.735.000		55.470.000		55.470.000		55.470.000		55.470.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Anggaran Diklat PDNS Penagak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penagak Peraturan Daerah	0	1	27.735.000	1	55.470.000	1	55.470.000	1	55.470.000	1	55.470.000		
Meningkatnya Kepuasan masyarakat terhadap Penda dan Perkota	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%)	100	100	247.265.000	100	454.530.000	100	574.530.000	100	764.530.000	100	1.010.000.000		
1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Keterlraman dan Keterliban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)				690.000.000		970.000.000		1.180.000.000		1.380.000.000		1.624.530.000		
Meningkatnya Penegaghan Gangguan Keterlraman dan Keterliban Umum di Sulawesi Tengah	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan keterlraman, Keterliban Umum dan Perlindungan Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Penda dan	0	4	80.000.000	4	120.000.000	4	140.000.000	4	180.000.000	4	200.000.000		
		1	4		4		4		4		4			
1.05.02.1.01.0015 - Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala				50.000.000		60.000.000		80.000.000		90.000.000		100.000.000		
Tersedianya Pelayanan Dasar kepada warga negara yang terkena dampak Penegakan Penda dan Perkota	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Penda dan	1	4	50.000.000	4	60.000.000	4	80.000.000	4	90.000.000	4	100.000.000		
1.05.02.1.01.0023 - Kerjasama penyelenggaraan keterlraman, Keterliban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi				30.000.000		60.000.000		60.000.000		70.000.000		100.000.000		
Tersedianya laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan keterlraman, Keterliban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas kabupaten/kota	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan keterlraman, Keterliban Umum dan Perlindungan	0	4	30.000.000	4	60.000.000	4	60.000.000	4	70.000.000	4	100.000.000		
1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan				167.265.000		334.530.000		434.530.000		604.530.000		810.000.000		
Meningkatnya Penegaghan Pelanggaran Penda dan Pengub	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Penda Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialkasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Jumlah Perkara yang Dapat Diklatangkan (laporan) Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0	4	167.265.000	4	334.530.000	4	434.530.000	4	604.530.000	4	810.000.000		
		0	1		1		1		1		1			
		0	1		1		1		1		1			
		1	4		4		4		4		4			
		0	4		4		4		4		4			
		0	2		2		3		4		5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan	1	4		4		4		4		4			
1.05.02.1.02.0002 - Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				50.000.000		100.000.000		100.000.000		150.000.000		200.000.000		
Tertaksananya pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1	4	50.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	150.000.000	4	200.000.000		
1.05.02.1.02.0007 - Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah				7.265.000		24.530.000		24.530.000		40.000.000		50.000.000		
Tertaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Didaftarkan (laporan)	0	4	7.265.000	4	24.530.000	4	24.530.000	4	40.000.000	4	50.000.000		
1.05.02.1.02.0009 - Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Pegawai Peraturan Daerah				30.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tertaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Pegawai Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	0	1	30.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.05.02.1.02.0010 - Sosialisasi Kebutuhan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				50.000.000		100.000.000		100.000.000		154.530.000		200.000.000		
Tertaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan	1	4	50.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	154.530.000	4	200.000.000		
1.05.02.1.02.0011 - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub uraian ketertarikan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
1.05.02.1.02.0012 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				10.000.000		10.000.000		50.000.000		50.000.000		100.000.000		
Tertaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	0	4	10.000.000	4	10.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	100.000.000		
1.05.02.1.02.0014 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub uraian ketertarikan				10.000.000		40.000.000		100.000.000		150.000.000		200.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0	2	10.000.000	2	40.000.000	3	100.000.000	4	150.000.000	5	200.000.000		
Terlaksananya penanganan gangguan ketertarikan dan ketertarikan	Transkrip yang dapat	100	100	435.000.000	100	585.000.000	100	665.000.000	100	745.000.000	100	869.530.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Laporan Tentang Potensi Gangguan Transbumimas yang di	100	100		100		100		100		100			
1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Keterlaksanaan dan Keterlibatan Umum Lintas Daerah Kebudayaan/Kota dalam 1 (Satu)				690.000.000		970.000.000		1.180.000.000		1.380.000.000		1.624.530.000		
Tertaksananya Penanganan Gangguan Keterlaksanaan dan Keterlibatan Umum Berdasarkan Perda dan Perkota Melalui Penelitian dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Keterlaksanaan dan Keterlibatan Umum yang Ditinjau Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patrol, Pengamanan dan Pencegahan (Rapat)	4	4	435.000.000	4	585.000.000	4	665.000.000	4	745.000.000	4	869.530.000		
	Jumlah Laporan Gangguan Keterlaksanaan dan Keterlibatan Umum Berdasarkan Perda dan Perkota Melalui Penelitian dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Ditindaklanjuti	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen SOP Keterlibatan Umum dan Keterlaksanaan Masyarakat yang Telah Dibuat dan Jumlah Dokumen SK Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Rasio Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Keterlaksanaan, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	100	20		20		20		40		40			
1.05.02.1.01.0008 - Penyusunan SOP Keterlibatan Umum dan Keterlaksanaan Masyarakat				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Dokumen SOP Keterlibatan Umum dan Keterlaksanaan Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Keterlibatan Umum dan Keterlaksanaan Masyarakat yang Telah Dibuat dan	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
1.05.02.1.01.0011 - Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terbentuknya Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP yang ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP (Dokumen)	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
1.05.02.1.01.0014 - Koordinasi Penyelenggaraan Keterlaksanaan, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi				70.000.000		100.000.000		120.000.000		140.000.000		200.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kelereneran, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kelereneran, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1	1	70.000.000	1	100.000.000	1	120.000.000	1	140.000.000	1	200.000.000		
1.05.02.1.01.0020 - Pencegahan atas Gangguan Kelereneran dan Keterlibatan Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa				50.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000		110.000.000		
Tertaksananya Pencegahan atas Gangguan Kelereneran dan Keterlibatan Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Tidak Terkendali	Jumlah Laporan Gangguan Kelereneran dan Keterlibatan Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Tidak Terkendali	4	4	50.000.000	4	70.000.000	4	80.000.000	4	90.000.000	4	110.000.000		
1.05.02.1.01.0021 - Pencegahan Gangguan Kelereneran dan Keterlibatan Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Penindakan				200.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		294.530.000		
Tertaksananya Pencegahan Gangguan Kelereneran dan Keterlibatan Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Penindakan	Jumlah Laporan Gangguan Kelereneran dan Keterlibatan Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Penindakan	4	4	200.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	4	294.530.000		
1.05.02.1.01.0024 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja				100.000.000		150.000.000		200.000.000		250.000.000		250.000.000		
Tertaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	100	20	100.000.000	20	150.000.000	30	200.000.000	40	250.000.000	40	250.000.000		
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Satgas Linmas yang terbentuk (%)	100	100	155.000.000	100	215.000.000	100	275.000.000	100	325.000.000	100	355.000.000		
1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Kelereneran dan Keterlibatan Umum Linas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)				690.000.000		970.000.000		1.180.000.000		1.380.000.000		1.624.530.000		
meningkatkan perlindungan Masyarakat di Sulawesi Tengah	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang dibentuk	100	20	155.000.000	20	215.000.000	30	275.000.000	40	325.000.000	40	355.000.000		
	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas di tingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dalam rangka Kelereneran dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan	1	4		4		4		4		4			
1.05.02.1.01.0012 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terbentuknya Satgas Linmas di tingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas di tingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
1.05.02.1.01.0022 - Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Kelentihan Umum dan Perlindungan				50.000.000		60.000.000		70.000.000		70.000.000		100.000.000		
Tersedianya laporan yang Memuat Hasil Pembendayaan Satuan Pelindungan Masyarakat dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Kelentihan Umum serta Perlindungan	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pembendayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Kelentihan Umum serta Perlindungan	1	4	50.000.000	4	60.000.000	4	70.000.000	4	70.000.000	4	100.000.000		
1.05.02.1.01.0030 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat				100.000.000		150.000.000		200.000.000		250.000.000		250.000.000		
Tertakutnya Peningkatan Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Pelindungan Masyarakat yang Dilengkapi Kapasitasnya	100	20	100.000.000	20	150.000.000	30	200.000.000	40	250.000.000	40	250.000.000		
Meningkatnya Sarana Prasarana Penanganan Transibundimas	Persentase Sarana Prasarana Penanganan Transibundimas Yang Terepenuhi (%)	100	100	20.000.000	100	50.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	200.000.000		
1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Kelentihan Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Wilayahnya				690.000.000		970.000.000		1.180.000.000		1.380.000.000		1.624.530.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Kelentihan Umum yang Tersedia (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Kelentihan Umum yang Tersedia (Unit)	0	1	20.000.000	1	50.000.000	3	100.000.000	4	150.000.000	5	200.000.000		
1.05.02.1.01.0024 - Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Kelentihan Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung penanganan				20.000.000		50.000.000		100.000.000		150.000.000		200.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Kelentihan Umum yang Tersedia (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Kelentihan Umum yang Tersedia (Unit)	0	1	20.000.000	1	50.000.000	3	100.000.000	4	150.000.000	5	200.000.000		
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KERAKARAN				1.000.000.000		1.396.175.503,5		1.552.886.788,12		2.100.000.000		2.650.000.000		
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Terpenuhinya Kebutuhan SPM sub urusan Kebakaran yang sesuai standar* (daerah)	13	13	700.000.000	13	1.096.175.503,5	13	1.252.886.788,12	13	1.800.000.000	13	2.350.000.000	1.05.050.550.01.3 000 - Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah	
1.05.05.01 - Peningkatan Pemetaan Risiko Bencana				800.000.000		966.175.503,5		1.152.886.788,12		1.600.000.000		2.150.000.000		
Meningkatnya Kualitas Penyediaan Informasi Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran	0	1	500.000.000	1	696.175.503,5	1	852.886.788,12	1	1.300.000.000	1	1.850.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Simulasi Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SIK) yang Bisa Diperbaharui Atau Dimutakhirkan secara Berkala, Berkelanjutan dan Real Time yang terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Kecamatan	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Jumlah Dokumen Periode	1	14		14		14		14		14			
	Penyenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan Legal (Dokumentasi)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	0	7		14		14		14		14			
1.05.04.1.01.0006 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				50.000.000		32.895.913,5		142.144.463		550.000.000		1.100.000.000		
Tersedianya Dokumen secara Periode Penyenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah, dan Legal (Dokumentasi)	Jumlah Dokumen Periode Penyenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan Legal (Dokumentasi)	0	1	50.000.000	1	32.895.913,5	1	142.144.463	1	550.000.000	1	1.100.000.000		
1.05.04.1.01.0009 - Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota				100.000.000		182.895.918		192.144.463		200.000.000		200.000.000		
Tertaklarnya Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	0	7	100.000.000	14	182.895.918	14	192.144.463	14	200.000.000	14	200.000.000		
Penyenggaraan Jabatan				50.000.000		32.895.918		42.144.463		50.000.000		50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tertakutnya kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran	0	1	50.000.000	1	32.695.918	1	42.144.463	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.05.04.1.01.0023 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota				100.000.000		182.695.918		192.144.463		200.000.000		200.000.000		
Tertakutnya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1	14	100.000.000	14	182.695.918	14	192.144.463	14	200.000.000	14	200.000.000		
1.05.04.1.01.0024 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				100.000.000		182.695.918		192.144.463		200.000.000		200.000.000		
Tertakutnya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Melalui Media Sosial, Wahana Multi Media Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	0	1	100.000.000	1	182.695.918	1	192.144.463	1	200.000.000	1	200.000.000		
1.05.04.1.01.0030 - Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi				100.000.000		82.695.918		92.144.473,12		100.000.000		100.000.000		
Tertakutnya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) yang Bisa Diperbaharui Atau Dimutakhirkan secara Berkala, Berkelanjutan dan Real Time yang terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Kabupaten/Kota dan dapat Menyajikan Masyarakat	Jumlah Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) yang Bisa Diperbaharui Atau Dimutakhirkan secara Berkala, Berkelanjutan dan Real Time yang terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Kabupaten/Kota dan dapat Menyajikan Masyarakat	0	1	100.000.000	1	82.695.918	1	92.144.473,12	1	100.000.000	1	100.000.000		
1.05.04.1.02 - Pembinaan dan Penguasaan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				200.000.000		400.000.000		400.000.000		500.000.000		500.000.000		
Meningkatnya Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1	4	200.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000		
	Jumlah laporan pembinaan dan penguasaan penyelenggaraan jabatan fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis	0	4		4		4		4		4			
1.05.04.1.02.0003 - Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran				100.000.000		200.000.000		200.000.000		250.000.000		250.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tertakutnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	0	4	100.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000		
1.05.04.1.02.0004 - Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				100.000.000		200.000.000		200.000.000		250.000.000		250.000.000		
Tertakutnya Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1	4	100.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000		
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	100	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000		
1.05.04.1.02.0004 - Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				800.000.000		966.175.503,5		1.152.866.786,12		1.600.000.000		2.150.000.000		
Meningkatnya Pembinaan Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Kab/Kota	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal (Dokumen)	0	13	200.000.000	13	200.000.000	13	200.000.000	13	200.000.000	13	200.000.000		
1.05.04.1.01.0019 - Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Dokumen Pemutakhiran Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal (Dokumen)	0	13	100.000.000	13	100.000.000	13	100.000.000	13	100.000.000	13	100.000.000		
1.05.04.1.01.0022 - Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal (Dokumen)	0	13	100.000.000	13	100.000.000	13	100.000.000	13	100.000.000	13	100.000.000		
Meningkatnya Pengelolaan Informasi Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Kab/Kota	Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)	1	13	100.000.000	13	100.000.000	13	100.000.000	13	100.000.000	13	100.000.000		
1.05.04.1.01.0004 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah, Antar Lembaga, dan Komunitas dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedia Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Bertalasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)	1	13	100.000.000	13	100.000.000	13	100.000.000	13	100.000.000	13	100.000.000		

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah juga mempunyai kegiatan/sub kegiatan yang mendukung program prioritas Pembangunan daerah yang mendukung program prioritas Berani Berintegritas. Adapun kegiatan/sub kegiatan yang dimaksud dapat dilihat pada Tabel 4.3:

Tabel 4.3 Daftar Kegiatan/Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
1	Berani Berintegritas	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	
		Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
		Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	
		Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang satuan dan target tahunannya dilihat pada table 4.4

Tabel 4.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERAN GAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah									
2.	Nilai Dimensi Strategi Indeks Trantibum	Nilai	10,1	10,12	10,34	10,46	10,66	10,86	10,9	
3.	Nilai Dimensi SDM Indeks Trantibum	Nilai	24,6	24,74	24,74	24,99	24,99	25,22	25,6	
4.	Nilai Dimensi Sistem Indeks Trantibum	Nilai	15,87	16,14	16,42	16,55	16,85	16,92	17	
5.	Persentase Kab/Kota Yang Memiliki Respon Time Rate	%	7,69	15,38	23,07	30,76	38,46	46,15	53,84	

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU), Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat diukur dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang satuan dan target tahunannya dilihat pada table 4.5 berikut:

Tabel 4.5 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

N O	INDIKATOR	STATU S	SATUA N	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERAN GAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
2.	Nilai Dimensi SDM Indeks Trantibum	positif	Nilai	24,6	24,74	24,74	24,99	24,99	25,22	25,6	
3.	Nilai Dimensi Strategi Indeks Trantibum	positif	Nilai	10,1	10,12	10,34	10,46	10,66	10,86	10,9	
4.	Nilai Dimensi Sistem Indeks Trantibum	positif	Nilai	15,87	16,14	16,42	16,55	16,85	16,92	17	
5.	Persentase Kab/Kota Yang Memiliki Respon Time Rate	positif	%	7,69	15,38	23,07	30,76	38,46	46,15	53,84	
6.	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Provinsi Sulawesi Tengah secara garis besar berisi program/ kegiatan, capaian program/ kegiatan/ hasil, target, lokasi, maupun kelompok sasaran yang mendukung tercapainya visi dan misi gubernur terpilih yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP ini telah disusun berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun prosesnya melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan serta aparat terkait di lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah, serta dengan mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan non kebakaran pada periode sebelumnya. Berkenaan dengan hal tersebut maka dalam implementasinya perlu diperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Renstra Satpol PP Provinsi Sulawesi Tengah telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.
2. Renstra Satpol PP ini merupakan pedoman bagi komponen Satpol PP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. Kejelasan rincian antara sasaran Satpol PP Provinsi Sulawesi Tengah, sasaran program, sasaran kegiatan dan rincian indikator, serta sinkronisasi penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) diharapkan dapat meningkatkan mutu keluaran (output) dan hasil (outcome) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

3. Seluruh komponen di lingkungan Satpol PP terutama bidang dan secretariat diwajibkan untuk menjabarkan Renstra Satpol PP 2025-2029 kedalam Rencana kerja bidangnya masing-masing
4. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan memperhatikan kaidah-kaidah hukum untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menghindari terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari.
5. Renstra Satpol PP 2025-2029 disusun berdasarkan sejumlah asumsi sesuai perkembangan kondisi terkini serta perspektif dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dan membutuhkan penanganan mendesak, perlu diperhitungkan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam aspek operasional termasuk hal-hal yang bersifat force majeure.

Dengan demikian, Renstra yang ada diharapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pelayanan penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan non kebakaran dan hasilnya dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Palu, 2025
Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Sulawesi Tengah

Drs. Farida Karim, M.Si
Pembina Tkt. I (IV/b)
NIP. 196819681204 198811 2 001

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah							
- MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat				Indeks Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Indeks)		
					Nilai Dimensi SDM Indeks Trantibum (Nilai)		
					Nilai Dimensi Strategi Indeks Trantibum (Nilai)		
					Nilai Dimensi Sistem Indeks Trantibum (Nilai)		
					Persentase Kab/Kota Yang Memiliki Respon Time Rate		
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Nilai)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.05.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.05.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.05.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	1.05.01.1.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Satpol PP Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1.05.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1.05.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.05.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Barang Milik Daerah pada Satpol PP Provinsi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.05.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.05.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.05.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.05.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.05.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.05.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya Profesionalisme ASN Satpol PP	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1.05.01.1.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.05.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.05.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.05.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.05.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Satpol PP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.1.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.05.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.05.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.05.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.1.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada		Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Meningkatnya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada (Laporan)	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah (Laporan)	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada (Laporan)	1.05.02.1.01.0015 - Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah (Laporan)	1.05.02.1.01.0023 - Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi	
				Meningkatnya Pencegahan Pelanggaran Perda dan Pergub	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Dokumen)	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP (Laporan)	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Laporan)	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	
					Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Unit)	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Laporan)	1.05.02.1.02.0002 - Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	
					Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	1.05.02.1.02.0007 - Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	
					Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)	1.05.02.1.02.0009 - Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.1.02.0010 - Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Dokumen)	1.05.02.1.02.0011 - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP (Laporan)	1.05.02.1.02.0012 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Unit)	1.05.02.1.02.0014 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	
			Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran		Terpenuhinya Kebutuhan SPM sub urusan Kebakaran yang sesuai standar* (daerah)	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
				Meningkatnya Kualitas Penyediaan Informasi Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Kab/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota) (Orang)	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran (Dokumen)	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Dokumen)	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan Legal (Dokumen)	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Laporan)	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) yang Bisa Diperbaharui Atau Dimutakhirkan secara Berkala, Berkelanjutan dan Real Time yang terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Kabupaten/Kota dan dapat Menjangkau Masyarakat (Laporan)	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan Legal (Dokumen)	1.05.04.1.01.0006 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
					Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota (Orang)	1.05.04.1.01.0009 - Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran (Dokumen)	1.05.04.1.01.0014 - Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Laporan)	1.05.04.1.01.0023 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Dokumen)	1.05.04.1.01.0024 - Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
					Jumlah Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) yang Bisa Diperbaharui Atau Dimutakhirkan secara Berkala, Berkelanjutan dan Real Time yang terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Kabupaten/Kota dan dapat Menjangkau Masyarakat (Laporan)	1.05.04.1.01.0038 - Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.05.04.1.02 - Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
					Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis	1.05.04.1.02 - Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
					Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran (Laporan)	1.05.04.1.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.05.04.1.02.0004 - Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
					Persentase Laporan Tentang Potensi Gangguan Trantibumlinmas yang di Tindaklanjuti (%)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi (Dokumen)	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen SK Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP (Dokumen)	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan (laporan)	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	1.05.02.1.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	
					Jumlah Dokumen SK Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP (Dokumen)	1.05.02.1.01.0011 - Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi (Dokumen)	1.05.02.1.01.0014 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	1.05.02.1.01.0020 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan (laporan)	1.05.02.1.01.0021 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	
					Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	1.05.02.1.01.0024 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
				Meningkatnya Pengelolaan Informasi Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)	1.05.04.1.01.0004 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
					Meningkatnya Pembinaan Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Kab/Kota	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
				Meningkatnya perlindungan terhadap masvarakat	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal (Dokumen)	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal (Dokumen)	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal (Dokumen)	1.05.04.1.01.0019 - Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal (Dokumen)	1.05.04.1.01.0022 - Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	
			Meningkatnya perlindungan terhadap masvarakat		Persentase Satgas Linmas yang terbentuk (%)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				meningkatnya perlindungan Masyarakat di Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur (Dokumen)	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat (Laporan)	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur (Dokumen)	1.05.02.1.01.0012 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi	
					Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat (Laporan)	1.05.02.1.01.0022 - Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	
					Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.05.02.1.01.0030 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	
			Meningkatnya kapasitas SDM PPNS		Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase PNS yang Ditingkatkan Kapasitasnya Menjadi PPNS	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)	1.05.02.1.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)	1.05.02.1.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	
					Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (laporan)	1.05.02.1.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	1.05.02.1.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	
					Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen)	1.05.02.1.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	
					Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen)	1.05.02.1.03.0003 - Pembentukan Sekretariat PPNS	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)	1.05.02.1.03.0004 - Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (laporan)	1.05.02.1.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	1.05.02.1.03.0007 - Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	
					Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)	1.05.02.1.03.0008 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	
			Meningkatnya Sarana Prasarana Penanganan Trantibumlinmas		Persentase Sarana Prasarana Penanganan Trantibumlinmas Yang Terpenuhi (%)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	1.05.02.1.01.0029 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				19.399.042.565,88		20.655.283.191,5		22.166.589.763,12		23.857.715.135,79		25.754.931.593,92		
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				17.399.042.565,88		17.709.107.688		18.713.722.975		19.457.715.135,79		20.254.931.593,92		
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	58,42	68,4	17.399.042.565,88	70	17.709.107.688	70,5	18.713.722.975	71	19.457.715.135,79	72	20.254.931.593,92	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah	
1.05.01.1.01 - Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30.000.000		30.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Satpol PP Provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	4	30.000.000	4	30.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	5		5		5		5		5			
1.05.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.000.000		10.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	2	10.000.000	2	10.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000		
1.05.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5.000.000		5.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	4	5.000.000	4	5.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000		
1.05.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
1.05.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				5.000.000		5.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
1.05.01.1.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000		
1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.299.042.566		13.909.107.689		14.613.722.976		15.137.004.967		15.653.203.092		
Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Satpol PP Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	1	13.299.042.566	1	13.909.107.689	1	14.613.722.976	1	15.137.004.967	1	15.653.203.092		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	93	121		121		121		121		121			
1.05.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				13.099.042.566		13.709.107.689		14.413.722.976		14.937.004.967		15.453.203.092		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	93	121	13.099.042.566	121	13.709.107.689	121	14.413.722.976	121	14.937.004.967	121	15.453.203.092		
1.05.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				185.000.000		185.000.000		185.000.000		185.000.000		185.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	1	185.000.000	1	185.000.000	1	185.000.000	1	185.000.000	1	185.000.000		
1.05.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
1.05.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Barang Milik Daerah pada Satpol PP Provinsi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	4		4		4		4		4			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
1.05.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000		
1.05.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000		
1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				5.000.000		5.000.000		170.000.000		175.000.000		275.000.000		
Meningkatnya Profesionalisme ASN Satpol PP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	5	5.000.000	5	5.000.000	5	170.000.000	5	175.000.000	5	275.000.000		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	1		1		1		1		1			
1.05.01.1.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1.000.000		1.000.000		15.000.000		20.000.000		20.000.000		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
1.05.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				1.000.000		1.000.000		100.000.000		100.000.000		200.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000		
1.05.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2.000.000		2.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
1.05.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				1.000.000		1.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	5	1.000.000	5	1.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000		
1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				239.572.500		239.572.500		309.572.500		354.572.500		354.572.500		
Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	239.572.500	1	239.572.500	1	309.572.500	1	354.572.500	1	354.572.500		
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
1.05.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		
1.05.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				14.572.500		14.572.500		14.572.500		14.572.500		14.572.500		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	14.572.500	1	14.572.500	1	14.572.500	1	14.572.500	1	14.572.500		
1.05.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150.000.000		150.000.000		220.000.000		265.000.000		265.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	4	150.000.000	4	150.000.000	4	220.000.000	4	265.000.000	4	265.000.000		
1.05.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang				400.000.000,88		100.000.000		150.000.000		320.710.169,79		501.728.502,92		
Urusan Pemerintah Daerah														
Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Satpol PP	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	5	400.000.000,88	5	100.000.000	5	150.000.000	5	320.710.169,79	5	501.728.502,92		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				80.000.000		20.000.000		20.000.000		100.000.000		220.345.702,92		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	80.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	100.000.000	1	220.345.702,92		
1.05.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				80.000.000		20.000.000		20.000.000		60.710.169,79		70.345.700		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	80.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	60.710.169,79	1	70.345.700		
1.05.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				80.000.000		20.000.000		10.000.000		60.000.000		70.345.700		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	1	80.000.000	1	20.000.000	1	10.000.000	1	60.000.000	1	70.345.700		
1.05.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				80.000.000		20.000.000		50.000.000		50.000.000		70.345.700		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	5	80.000.000	5	20.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	70.345.700		
1.05.01.1.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				80.000.000,88		20.000.000		50.000.000		50.000.000		70.345.700		
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	5	80.000.000,88	5	20.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	70.345.700		
1.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.840.427.499		2.840.427.499		2.840.427.499		2.840.427.499		2.840.427.499		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	4	2.840.427.499	4	2.840.427.499	4	2.840.427.499	4	2.840.427.499	4	2.840.427.499		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	4		4		4		4		4			
1.05.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000		
1.05.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				205.000.000		205.000.000		205.000.000		205.000.000		205.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	4	205.000.000	4	205.000.000	4	205.000.000	4	205.000.000	4	205.000.000		
1.05.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000		
1.05.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.595.427.499		2.595.427.499		2.595.427.499		2.595.427.499		2.595.427.499		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	4	2.595.427.499	4	2.595.427.499	4	2.595.427.499	4	2.595.427.499	4	2.595.427.499		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				570.000.000		570.000.000		570.000.000		570.000.000		570.000.000		
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	50	570.000.000	50	570.000.000	50	570.000.000	50	570.000.000	50	570.000.000		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	21	23		23		23		23		23			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2		2		2		2		2			
1.05.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	21	23	450.000.000	23	450.000.000	23	450.000.000	23	450.000.000	23	450.000.000		
1.05.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000		
1.05.01.1.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000		
1.05.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000		
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				1.000.000.000		1.550.000.000		1.900.000.000		2.300.000.000		2.850.000.000		
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100	142.735.000	100	245.470.000	100	285.470.000	100	315.470.000	100	415.470.000	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah	
1.05.02.1.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi				142.735.000		245.470.000		285.470.000		315.470.000		415.470.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Persentase PNS yang Ditingkatkan Kapasitasnya Menjadi PPNS	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)	1	1	142.735.000	1	245.470.000	1	285.470.000	1	315.470.000	1	415.470.000			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	1	1				1				1				
	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (laporan)	0	4				4				4				
	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)	0	1				1				1				
	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen)	0	1				1				1				
1.05.02.1.03.0003 - Pembentukan Sekretariat PPNS				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000			
Terbentuknya Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000			
1.05.02.1.03.0004 - Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah				50.000.000		70.000.000		80.000.000		80.000.000		100.000.000			
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)	1	1	50.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	100.000.000			
1.05.02.1.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS				15.000.000		50.000.000		70.000.000		100.000.000		150.000.000			
Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (laporan)	0	4	15.000.000	4	50.000.000	4	70.000.000	4	100.000.000	4	150.000.000			
1.05.02.1.03.0007 - Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum				40.000.000		60.000.000		70.000.000		70.000.000		100.000.000			
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	1	1	40.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	100.000.000			
1.05.02.1.03.0008 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum				27.735.000		55.470.000		55.470.000		55.470.000		55.470.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)	0	1	27.735.000	1	55.470.000	1	55.470.000	1	55.470.000	1	55.470.000		
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%)	100	100	247.265.000	100	454.530.000	100	574.530.000	100	764.530.000	100	1.010.000.000		
1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				690.000.000		970.000.000		1.180.000.000		1.380.000.000		1.624.530.000		
Meningkatnya Pencegahan Gangguan Ketentrman dan Ketertiban Umum di Sulawesi Tengah	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah (Laporan)	0	4	80.000.000	4	120.000.000	4	140.000.000	4	160.000.000	4	200.000.000		
	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada (Laporan)	1	4		4				4					
1.05.02.1.01.0015 - Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				50.000.000		60.000.000		80.000.000		90.000.000		100.000.000		
Tersedianya Pelayanan Dasar kepada warga negara yang terkena dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada (Laporan)	1	4	50.000.000	4	60.000.000	4	80.000.000	4	90.000.000	4	100.000.000		
1.05.02.1.01.0023 - Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi				30.000.000		60.000.000		60.000.000		70.000.000		100.000.000		
Tersedianya laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah (Laporan)	0	4	30.000.000	4	60.000.000	4	60.000.000	4	70.000.000	4	100.000.000		
1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur				167.265.000		334.530.000		434.530.000		604.530.000		810.000.000		
Meningkatnya Pencegahan Pelanggaran Perda dan Pergub	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP (Laporan)	0	4	167.265.000	4	334.530.000	4	434.530.000	4	604.530.000	4	810.000.000		
	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1	4		4		4		4		4			
	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	0	4		4		4		4		4			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Unit)	0	2		2		3		4		5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Laporan)	1	4		4		4		4		4			
1.05.02.1.02.0002 - Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				50.000.000		100.000.000		100.000.000		150.000.000		200.000.000		
Terlaksananya pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Laporan)	1	4	50.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	150.000.000	4	200.000.000		
1.05.02.1.02.0007 - Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah				7.265.000		24.530.000		24.530.000		40.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	0	4	7.265.000	4	24.530.000	4	24.530.000	4	40.000.000	4	50.000.000		
1.05.02.1.02.0009 - Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah				30.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)	0	1	30.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.05.02.1.02.0010 - Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				50.000.000		100.000.000		100.000.000		154.530.000		200.000.000		
Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1	4	50.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	154.530.000	4	200.000.000		
1.05.02.1.02.0011 - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Dokumen)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
1.05.02.1.02.0012 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				10.000.000		10.000.000		50.000.000		50.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP (Laporan)	0	4	10.000.000	4	10.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	100.000.000		
1.05.02.1.02.0014 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum				10.000.000		40.000.000		100.000.000		150.000.000		200.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Unit)	0	2	10.000.000	2	40.000.000	3	100.000.000	4	150.000.000	5	200.000.000		
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100	100	435.000.000	100	585.000.000	100	665.000.000	100	745.000.000	100	869.530.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN																														
			2026		2027		2028		2029		2030																																	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU																																
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)																														
	Persentase Laporan Tentang Potensi Gangguan Trantibumlinmas yang di Tindakanjuti (%)	100	100			100			100		100																																	
1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				690.000.000		970.000.000		1.180.000.000		1.380.000.000		1.624.530.000																																
Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan (laporan)	4	4	435.000.000	4	585.000.000	4	665.000.000	4	745.000.000	4	869.530.000																																
	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	4	4												4	4	4	4	4	4																								
	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	0	1																		1	1	1	1	1	1																		
	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP (Dokumen)	0	1																								1	1	1	1	1	1												
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi (Dokumen)	1	1																														1	1	1	1	1	1						
	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	100	20																																				20	30	40	40	40	40
1.05.02.1.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000																																
Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000																																
1.05.02.1.01.0011 - Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000																																
Terbentuknya Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP yang ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP (Dokumen)	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000																																
1.05.02.1.01.0014 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi				70.000.000		100.000.000		120.000.000		140.000.000		200.000.000																																

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi (Dokumen)	1	1	70.000.000	1	100.000.000	1	120.000.000	1	140.000.000	1	200.000.000		
1.05.02.1.01.0020 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				50.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000		110.000.000		
Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	4	4	50.000.000	4	70.000.000	4	80.000.000	4	90.000.000	4	110.000.000		
1.05.02.1.01.0021 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				200.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		294.530.000		
Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan (laporan)	4	4	200.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	4	294.530.000		
1.05.02.1.01.0024 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja				100.000.000		150.000.000		200.000.000		250.000.000		250.000.000		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	100	20	100.000.000	20	150.000.000	30	200.000.000	40	250.000.000	40	250.000.000		
Meningkatnya perlindungan terhadap masvarakat	Persentase Satgas Linmas yang terbentuk (%)	100	100	155.000.000	100	215.000.000	100	275.000.000	100	325.000.000	100	355.000.000		
1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				690.000.000		970.000.000		1.180.000.000		1.380.000.000		1.624.530.000		
meningkatnya perlindungan Masyarakat di Sulawesi Tengah	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	100	20	155.000.000	20	215.000.000	30	275.000.000	40	325.000.000	40	355.000.000		
	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat (Laporan)	1	4		4		4		4		4			
1.05.02.1.01.0012 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terbentuknya Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur (Dokumen)	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
1.05.02.1.01.0022 - Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat				50.000.000		60.000.000		70.000.000		70.000.000		100.000.000		
Tersedianya laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Pelindungan Masyarakat dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat (Laporan)	1	4	50.000.000	4	60.000.000	4	70.000.000	4	70.000.000	4	100.000.000		
1.05.02.1.01.0030 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat				100.000.000		150.000.000		200.000.000		250.000.000		250.000.000		
Terlaksananya Peningkatan Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	100	20	100.000.000	20	150.000.000	30	200.000.000	40	250.000.000	40	250.000.000		
Meningkatnya Sarana Prasarana Penanganan Trantibumlinmas	Persentase Sarana Prasarana Penanganan Trantibumlinmas Yang Terpenuhi (%)	100	100	20.000.000	100	50.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	200.000.000		
1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				690.000.000		970.000.000		1.180.000.000		1.380.000.000		1.624.530.000		
Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	0	1	20.000.000	1	50.000.000	3	100.000.000	4	150.000.000	5	200.000.000		
1.05.02.1.01.0029 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum				20.000.000		50.000.000		100.000.000		150.000.000		200.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	0	1	20.000.000	1	50.000.000	3	100.000.000	4	150.000.000	5	200.000.000		
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				1.000.000.000		1.396.175.503,5		1.552.866.788,12		2.100.000.000		2.650.000.000		
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Terpenuhinya Kebutuhan SPM sub urusan Kebakaran yang sesuai standar* (daerah)	13	13	700.000.000	13	1.096.175.503,5	13	1.252.866.788,12	13	1.800.000.000	13	2.350.000.000	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah	
1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran				800.000.000		996.175.503,5		1.152.866.788,12		1.600.000.000		2.150.000.000		
Meningkatnya Kualitas Penyediaan Informasi Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Kab/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran (Dokumen)	0	1	500.000.000	1	696.175.503,5	1	852.866.788,12	1	1.300.000.000	1	1.850.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) yang Bisa Diperbaharui Atau Dimutakhirkan secara Berkala, Berkelanjutan dan Real Time yang terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Kabupaten/Kota dan dapat Menjangkau Masyarakat (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Laporan)	1	14		14		14		14		14			
	Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan Legal (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota) (Orang)	0	7		14		14		14		14			
1.05.04.1.01.0006 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				50.000.000		32.695.913,5		142.144.463		550.000.000		1.100.000.000		
Tersedianya Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan Legal (Dokumen)	0	1	50.000.000	1	32.695.913,5	1	142.144.463	1	550.000.000	1	1.100.000.000		
1.05.04.1.01.0009 - Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota				100.000.000		182.695.918		192.144.463		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota) (Orang)	0	7	100.000.000	14	182.695.918	14	192.144.463	14	200.000.000	14	200.000.000		
1.05.04.1.01.0014 - Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran				50.000.000		32.695.918		42.144.463		50.000.000		50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran (Dokumen)	0	1	50.000.000	1	32.695.918	1	42.144.463	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.05.04.1.01.0023 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota				100.000.000		182.695.918		192.144.463		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Laporan)	1	14	100.000.000	14	182.695.918	14	192.144.463	14	200.000.000	14	200.000.000		
1.05.04.1.01.0024 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				100.000.000		182.695.918		192.144.463		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Melalui Media Sosial, Wahana Multi Media Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Dokumen)	0	1	100.000.000	1	182.695.918	1	192.144.463	1	200.000.000	1	200.000.000		
1.05.04.1.01.0038 - Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi				100.000.000		82.695.918		92.144.473,12		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) yang Bisa Diperbaharui Atau Dimutakhirkan secara Berkala, Berkelanjutan dan Real Time yang terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Kabupaten/Kota dan dapat Menjangkau Masyarakat	Jumlah Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) yang Bisa Diperbaharui Atau Dimutakhirkan secara Berkala, Berkelanjutan dan Real Time yang terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Kabupaten/Kota dan dapat Menjangkau Masyarakat (Laporan)	0	1	100.000.000	1	82.695.918	1	92.144.473,12	1	100.000.000	1	100.000.000		
1.05.04.1.02 - Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				200.000.000		400.000.000		400.000.000		500.000.000		500.000.000		
Meningkatnya Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Laporan)	1	4	200.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000		
	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran (Laporan)	0	4				4		4		4			
1.05.04.1.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran				100.000.000		200.000.000		200.000.000		250.000.000		250.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pembinaan dan pegawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	Jumlah laporan pembinaan dan pegawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran (Laporan)	0	4	100.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000		
1.05.04.1.02.0004 - Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				100.000.000		200.000.000		200.000.000		250.000.000		250.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Laporan)	1	4	100.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000		
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	100	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000		
1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran				800.000.000		996.175.503,5		1.152.866.788,12		1.600.000.000		2.150.000.000		
Meningkatnya Pembinaan Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Kab/Kota	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal (Dokumen)	0	13	200.000.000	13	200.000.000	13	200.000.000	13	200.000.000	13	200.000.000		
1.05.04.1.01.0019 - Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Dokumen Pemutakhiran Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal (Dokumen)	0	13	100.000.000	13	100.000.000	13	100.000.000	13	100.000.000	13	100.000.000		
1.05.04.1.01.0022 - Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal (Dokumen)	0	13	100.000.000	13	100.000.000	13	100.000.000	13	100.000.000	13	100.000.000		
Meningkatnya Pengelolaan Informasi Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)	1	13	100.000.000	13	100.000.000	13	100.000.000	13	100.000.000	13	100.000.000		
1.05.04.1.01.0004 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)	1	13	100.000.000	13	100.000.000	13	100.000.000	13	100.000.000	13	100.000.000		